

PETA MUTU PENDIDIKAN

JENJANG SMP KABUPATEN GIANYAR

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

Oleh :

Ni Wayan Surasmini, S.Si, M.Pd.

Drs. I Wayan Timbal, M.Pd.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BALI
2019**

PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP KABUPATEN GIANYAR

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

ISBN : 978-623-91297-4-3

Oleh :

Ni Wayan Surasmini, S.Si, M.Pd.
Drs. I Wayan Timbal, M.Pd.

Editor :

I Made Alit Dwitama, ST, M.Pd.

Desain Sampul :

Heru Susanto

Tata Letak :

Gus Ryan

Penerbit :

LPMP BALI
Anggota IKAPI No. 018/BAI/16

Redaksi:

Jl. Letda Tantular No. 14 Niti Mandala Denpasar 80234
Telp. 0361 225666, Fax. 0361 246682
Pos-el : lpmpbali@kemdikbud.go.id
Laman : lpmpbali.kemdikbud.go.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Gianyar dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Saya menyambut baik dengan adanya peta capaian mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Gianyar, sehingga dapat dijadikan dasar oleh pemerintah Kabupaten Gianyar dalam peningkatan mutu pendidikan jenjang SMP. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, yang telah berpartisipasi dalam penyusunan peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Gianyar.
2. TPMPD Kabupaten Gianyar yang telah bekerja keras mewujudkan capaian peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Gianyar.
3. Widyaiswara LPMP Bali yang telah berkontribusi secara akademis dalam pembuatan peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Gianyar.

Peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Gianyar, dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Gianyar.



Kepala LPMP Bali,

Made Alit Dwitama, S.T., M.Pd.

NIP 19741225 200312 1 004

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	3
D. Manfaat	3
BAB II PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN	
A. Mutu Pendidikan	4
B. Indikator Mutu Pendidikan	6
C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan	9
D. Sumber Data Peta Capaian SNP.....	19
E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP	19
BAB III HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SMP KABUPATEN GIANYAR	
A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018	20
B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan	26
C. Analisis Capaian Standar Isi	28
D. Analisis Capaian Standar Proses.....	31
E. Analisis Capaian Standar Penilaian.....	34
F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	37
G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana.....	40
H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan.....	42
I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan.....	44
J. Identifikasi Masalah Penyusunan Peta Mutu.....	46
K. Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan.....	47
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	51
B. Rekomendasi	51
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.....	7
Gambar 2.2	Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	8
Gambar 2.3	Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP	9
Gambar 3.1	Grafik Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018	21
Gambar 3.2	Grafik Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018	22
Gambar 3.3	Capaian Rapor Mutu Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018	24
Gambar 3.4	Grafik Radar Capaian Mutu SNP Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen	10
Tabel 3.1	Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018	20
Tabel 3.2	Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018	22
Tabel 3.3	Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018	23
Tabel 3.4	Capaian SNP pada Level Tertentu pada Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018	23
Tabel 3.5	Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Selama 3 Tahun.....	25
Tabel 3.6	Capaian Standar Kelulusan Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018	26
Tabel 3.7	Capaian Standar Isi Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018	29
Tabel 3.8	Capaian Standar Proses Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018	31
Tabel 3.9	Capaian Standar Penilaian Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018	34
Tabel 3.10	Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018	37
Tabel 3.11	Capaian Standar Sarana Prasarana Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018	41
Tabel 3.12	Capaian Standar Pengelolaan Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018	43
Tabel 3.13	Capaian Standar Pembiayaan Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018	44
Tabel 3.14	Identifikasi masalah Penyusunan Peta Mutu	46
Tabel 3.15	Data SNP yang tidak sesuai dengan kondisi riil satuan pendidikan...	48



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diamanatkan bahwa setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (whole school approach). Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan penyusunan peta mutu. Penyusunan peta mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan

akurat dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai base-line data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Sekolah/Madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu sekolah secara komprehensif yang berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat membangun semangat dan kultu penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil pemetaan mutu pendidikan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk dapat menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan 8 (delapan) SNP di tingkat sekolah. Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu pendidikan kemudian perlu dituangkan ke dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), untuk jangka waktu menengah, dan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) yang merupakan jangka pendek setiap tahun. Pemetaan mutu pendidikan diverifikasi oleh Pengawas Sekolah selaku pembina sekolah tersebut. Kegiatan agregasi dan analisis pemetaan mutu pendidikan dilakukan untuk mendapatkan peta tentang capaian 8 (delapan) SNP. Dari hasil analisis ini akan didapat gambaran tentang tahapan pengembangan setiap indikator dari setiap SNP untuk setiap jenjang pendidikan. Analisis ini akan menghasilkan peta mutu dan berbagai rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemerintah kecamatan/kabupaten/provinsi untuk dasar perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kecamatan/kabupaten / provinsi yang perlu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Agregasi data pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian strategi yang dilaksanakan oleh tim penjaminan mutu pendidikan daerah/pengawas sekolah tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah dan tenaga kependidikan berdasarkan SNP. Hasil agregasi ini menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya untuk dapat dipahami dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga menjadi suatu budaya mutu di tingkat kecamatan/kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat. Hal ini sesuai dengan peran Pemerintah Daerah baik Kabupaten maupun Kota dan Provinsi dalam Sistem Pendidikan Nasional, dalam hal: (1) menyediakan pelayanan pendidikan; (2) memonitor mutu pendidikan dan pelayanan pendukung pendidikan; (3) membuat laporan mengenai mutu dan kinerja sekolah; dan (4) meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan. Peta mutu pendidikan ini memaparkan peta capaian mutu SNP Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali untuk setiap jenjang pendidikan. Peta capaian mutu SNP dibuat sebagai perwujudan tugas dan wewenang LPMP Bali dalam memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten.

B. Dasar Hukum

Peta mutu pendidikan Kabupaten Gianyar didasari oleh dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya analisis peta mutu pendidikan (capaian Standar Nasional Pendidikan) Kabupaten Gianyar adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu pendidikan Kabupaten Gianyar serta analisisnya, dan untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat Kabupaten dan Provinsi Bali berdasarkan pemetaan mutu pendidikan dengan harapan dapat mendorong satuan pendidikan maupun pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan.

D. Manfaat

Pada akhirnya nanti, analisis peta capaian mutu SNP ini diharapkan dapat menjadi baseline pelaksanaan SPMP sebagai elemen esensial peningkatan mutu pendidikan sehingga SPMP dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016.



PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

A. Mutu Pendidikan

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah serta dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah dan manajemen kelas berfungsi untuk mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antar guru, siswa dan sarana pendukung di kelas.

Satori (2016) menyatakan bahwa mutu pendidikan adalah nilai dan manfaat yang sesuai dengan standar nasional pendidikan atas input, proses, output, dan outcome pendidikan yang dirasakan oleh pemakai jasa pendidikan dan pengguna hasil pendidikan. Memahami pengertian tentang mutu pendidikan selalu mengedepankan keadaan dan hasil pendidikan yang berada di masyarakat seperti Danim (2002) berpendapat bahwa kualitas pendidikan dilihat dari hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Di luar kerangka itu mutu keluaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh peserta didik selama mengikuti pendidikan. Djaali (2014) secara spesifik menyatakan bahwa ukuran mutu pendidikan adalah (1) kompetensi lulusan yang dinyatakan dengan pencapaian kompetensi dasar esensial minimal; (2)

kualitas proses pembelajaran di kelas dan proses pendidikan di sekolah. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah nilai tertinggi dari input, proses, output dan outcome pendidikan, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar nasional pendidikan, mutu pendidikan diukur melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Berkaitan dengan pemetaan mutu, Satori (2016) menyatakan bahwa pemetaan mutu adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Mutu pendidikan Indonesia dinilai berdasarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan. Jadi pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas SNP dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah untuk menghasilkan peta mutu pendidikan.

Peta mutu adalah representasi visual yang menyoroti profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Dengan kata lain peta mutu diperoleh dari suatu proses pemetaan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan dengan output berupa profil mutu yang di tingkat berikutnya diintegrasikan dalam batasan wilayah tertentu.

Pengumpulan data dan informasi dari profil satuan pendidikan idealnya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan karena pada hakikatnya sebuah peta harus dapat memberikan informasi bagi penggunanya untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai sebuah media informasi peta mutu harus memiliki kemudahan bagi penggunanya, kemudahan yang dimaksud berarti adanya kejelasan informasi dan tingkat keterbacaan peta yang cukup tinggi. Untuk itu suatu peta mutu diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif supaya tujuan pembuatan peta mutu dapat tercapai.

Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (baseline data) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian ke-8 SNP dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Sumber data dari penyusunan peta mutu di tiap tingkatan wilayah adalah data profil di tingkat satuan pendidikan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif kondisi satuan pendidikan dalam lingkup standar nasional pendidikan. Agregasi profil satuan pendidikan di tingkat selanjutnya diharapkan dapat disusun untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mendorong satuan pendidikan dalam melakukan upaya penjaminan mutu. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyusun profil capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan adalah instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS dapat digunakan satuan pendidikan untuk mengumpulkan data entitas satuan pendidikan dan data kualitas layanan pendidikan dengan acuan SNP.

Sebuah siklus dalam konteks sistem penjaminan mutu mensyaratkan output proses pemetaan yang berupa peta mutu pendidikan dapat menjadi input bagi proses peningkatan mutu berkelanjutan. Secara operasional proses peningkatan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal berupa program supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan. Penyusunan program supervisi dan fasilitasi dalam berbagai bentuknya dapat dilakukan apabila peta mutu yang disusun dapat digunakan sesuai kebutuhan. Untuk itu peta mutu pendidikan berbasis hasil capaian SNP hendaknya dapat dikembangkan menjadi peta dengan tema-tema tertentu yang lebih spesifik sesuai data dan informasi yang ada dalam profil satuan pendidikan. Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (baseline data) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Secara khusus tujuan penyusunan peta mutu dapat diturunkan dalam tingkat wilayah sebagai berikut.

1. Pemerintah kabupaten dapat melakukan agregasi profil mutu satuan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pendidikan di wilayah kabupaten.
2. Pemerintah provinsi dapat melakukan pemetaan mutu di daerahnya dan menggunakannya sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang pendidikan, perencanaan program dan penganggaran pendidikan, dan koordinasi antarkabupaten/kota dalam pelayanan pendidikan yang bermutu
3. Pemerintah dapat menggunakan profil mutu satuan pendidikan untuk menyusun peta mutu pendidikan nasional sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengalokasian anggaran di sektor pendidikan.

Secara visual peta mutu dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram, carta (daftar), matriks dan narasi dari data dan informasi yang ditampilkan. Sebagai agregat dari sejumlah profil dalam satu wilayah, visualisasi komperatif dari data dan informasi antar profil menjadi suatu alternatif informasi yang dapat ditampilkan dalam peta mutu pendidikan.

B. Indikator Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi,

kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud No. 28 Tahun 2016)

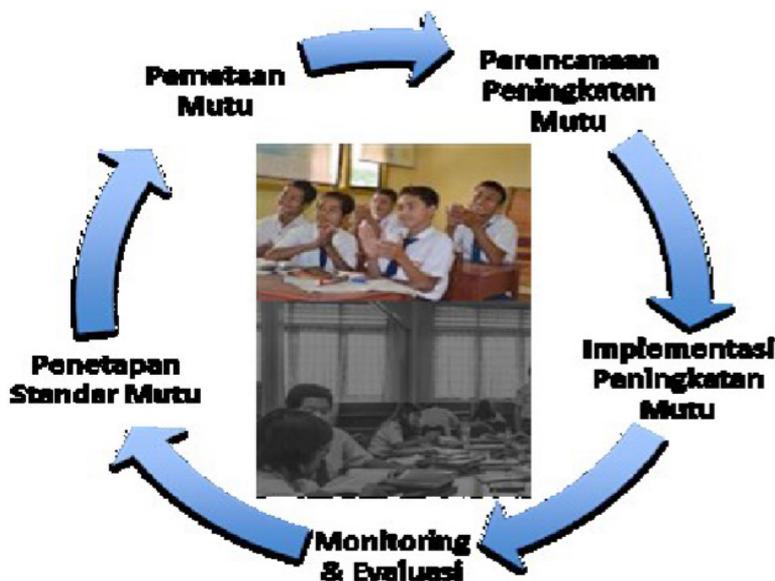
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan, sedangkan sistem informasi penjaminan mutu yang menunjang implementasi kedua sistem di atas.

Sistem mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas.

1. Penetapan standar sebagai landasan dimana Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi

2. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan
3. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah
4. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran; dan
5. Evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan Kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan bermutu.

Secara lengkap kelima siklus tersebut disajikan dalam gambar berikut.

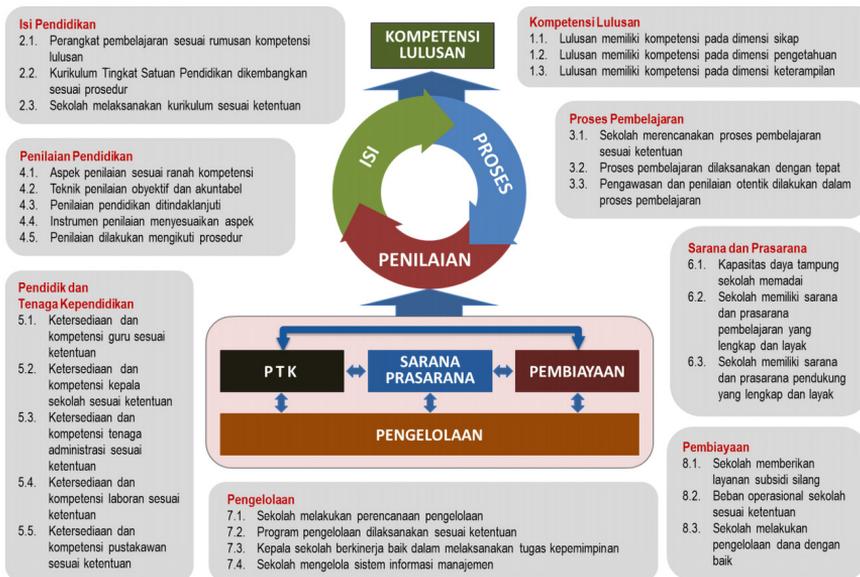


Gambar 2.2 Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Seluruh siklus ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sementara siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas: (1) pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis; (3) fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; (5) penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan; dan (6) pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian. Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standardisasi (BSNP) dan lembaga akreditasi BAN S/M atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (1) Standar

Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Sarana dan Prasarana, dan (8) Standar Pembiayaan.

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan. Secara ringkas indikator mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP

C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar

Sarana dan Prasarana; dan (8) Standar Pembiayaan Pengumpulan data mutu pendidikan Tahun 2017 berdasarkan 8 SNP dilaksanakan pada pertengahan tahun melalui aplikasi PMP yang merupakan bagian dari aplikasi Dapodik. Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan yang digunakan dalam program SPMP Tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan) SNP yang tertuang dalam 28 indikator dan 189 sub indikator, yaitu.

Tabel 2.1 Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
1	Standar Kompetensi Lulusan	1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
				1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berakhlak
				1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin
				1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun
				1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur
				1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli
				1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri
				1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab
				1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat
				1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani
		1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
		1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif
				1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif
				1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis
				1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri
				1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif
				1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
2	Standar Isi	2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap
				2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan
				2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan
				2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa
				2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran
		2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum
				2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan
				2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan
				2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan
		2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku
				2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi
				2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal
				2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa
3	Standar Proses	3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan
				3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi
				3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
				3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan
			3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran
			3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu
			3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah
			3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi
			3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu
			3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
			3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif
			3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat
			3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
			3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.
			3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa
			3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
			3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar
			3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran
		3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif
			3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik
			3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran
			3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru
			3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran
			3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator			
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan		
				4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah		
		4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel		
				4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap		
		4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian		
				4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik		
		4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap		
				4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan		
				4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan		
		4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur		
				4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur		
				4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai		
		5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4
						5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang
						5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran
5.1.4.	Bersertifikat pendidik						
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik						
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik						
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik						
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik						

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.2. Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4
			5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan
			5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan
			5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara
			5.2.5.	Bersertifikat pendidik
			5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah
			5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik
			5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik
			5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik
			5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
		5.3. Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi
			5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat
			5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat
			5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi
			5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan
			5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik
			5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik
			5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium
			5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai
			5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat
			5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai
			5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran
			5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
			5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran
			5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
			5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik
			5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik
			5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik
		5.5. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan
			5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai
			5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat
			5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai
			5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan
			5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan
			5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik
			5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik
			5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik
			5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
			5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai
				6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan
		6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar
				6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar
				6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar
				6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar
				6.2.5.	Memiliki laboratorium biologi sesuai standar
				6.2.6.	Memiliki laboratorium fisika sesuai standar
				6.2.7.	Memiliki laboratorium kimia sesuai standar
				6.2.8.	Memiliki laboratorium komputer sesuai standar
				6.2.9.	Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar
				6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai
				6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai
				6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai
				6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai
				6.2.14.	Kondisi laboratorium biologi layak pakai
				6.2.15.	Kondisi laboratorium fisika layak pakai
				6.2.16.	Kondisi laboratorium kimia layak pakai
				6.2.17.	Kondisi laboratorium komputer layak pakai
				6.2.18.	Kondisi laboratorium bahasa layak pakai

Kode Standar / Standar	Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator
	6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	6.3.1. Memiliki ruang pimpinan sesuai standar 6.3.2. Memiliki ruang guru sesuai standar 6.3.3. Memiliki ruang UKS sesuai standar 6.3.4. Memiliki tempat ibadah sesuai standar 6.3.5. Memiliki jamban sesuai standar 6.3.6. Memiliki gudang sesuai standar 6.3.7. Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar 6.3.8. Memiliki ruang tata usaha sesuai standar 6.3.9. Memiliki ruang konseling sesuai standar 6.3.10. Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar 6.3.11. Menyediakan kantin yang layak 6.3.12. Menyediakan tempat parkir yang memadai 6.3.13. Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja 6.3.14. Kondisi ruang pimpinan layak pakai 6.3.15. Kondisi ruang guru layak pakai 6.3.16. Kondisi ruang UKS layak pakai 6.3.17. Kondisi tempat ibadah layak pakai 6.3.18. Kondisi jamban sesuai standar 6.3.19. Kondisi gudang layak pakai 6.3.20. Kondisi ruang sirkulasi layak pakai 6.3.21. Kondisi ruang tata usaha layak pakai 6.3.22. Kondisi ruang konseling layak pakai 6.3.23. Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator		
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	
				7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	
				7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	
		7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	
				7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	
				7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	
				7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	
				7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	
				7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	
			7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik
					7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan
					7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik
					7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik
					7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan
					7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik
			7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan
	8	Standar Pembiayaan	8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu
					8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas
8.1.3.					Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	
		8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya
				8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana
				8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan

D. Sumber Data Peta Capaian SNP

Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018 ini diperoleh dari data yang terkumpul dan dipublikasikan secara lengkap pada bulan Juni 2019 baik data yang bersumber dari Dapodik (dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id) maupun data yang bersumber dari PMP (pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id). Capaian meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana dan Prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) Standar Pembiayaan.

E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

1. Menuju SNP level 1 : skor $\leq 2,04$
2. Menuju SNP level 2 : $2,05 \leq \text{skor} \leq 3,70$
3. Menuju SNP level 3 : $3,71 \leq \text{skor} \leq 5,06$
4. Menuju SNP level 4 : $5,07 \leq \text{skor} \leq 6,66$
5. SNP : $6,67 \leq \text{skor} \leq 7,00$



HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SMP KABUPATEN GIANYAR

A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018

Pada bagian ini akan disajikan capaian SNP secara umum dan perbandingannya dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018. Sebelumnya juga akan dipaparkan progres pengiriman data baik pada data PMP maupun Dapodik tahun 2018 sebagai dasar analisis rapor mutu daerah.

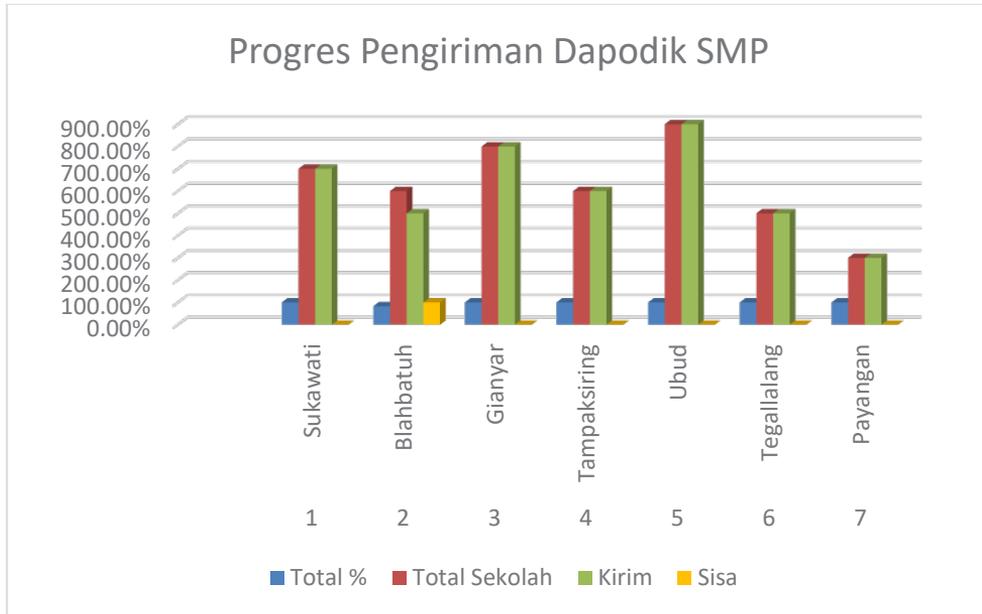
1. Progres Pengiriman Data pada Dapodik Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018

Tabel 3.1 Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018

No.	Kecamatan	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Sukawati	100%	7	7	0
2	Blahbatuh	83.33%	6	5	1
3	Gianyar	100%	8	8	0
4	Tampaksiring	100%	6	6	0
5	Ubud	100%	9	9	0
6	Tegallalang	100%	5	5	0
7	Payangan	100%	3	3	0
JUMLAH			44	43	1

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh tanggal 13-06-2019; 15:35)

Data Pengiriman dapodik dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut.



Gambar 3.1 Grafik Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah Jenjang SMP di Kabupaten Gianyar sebanyak 44 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman Dapodik semua sekolah sebanyak 43 sekolah sudah mengirimkan datanya, dan masih ada 1 sekolah yang belum mengirimkan datanya. Hal ini disebabkan karena sekolah tersebut merupakan sekolah baru dan masih dalam proses pengerjaan dapodik, sehingga menyebabkan sekolah tersebut lambat ngirim data dari batas waktu yang ditentukan. Sekolah yang dimaksud adalah SMP Negeri 3 Blahbatuh yang berada di wilayah Kecamatan Blahbatuh. Di tingkat Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar dalam pengiriman data dapodik menempati urutan ke tujuh (7). Data ini diberikan sebagai perbandingan jika dalam analisis data mutu, menemukan perbedaan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu pada standar yang berbeda.

2. Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018

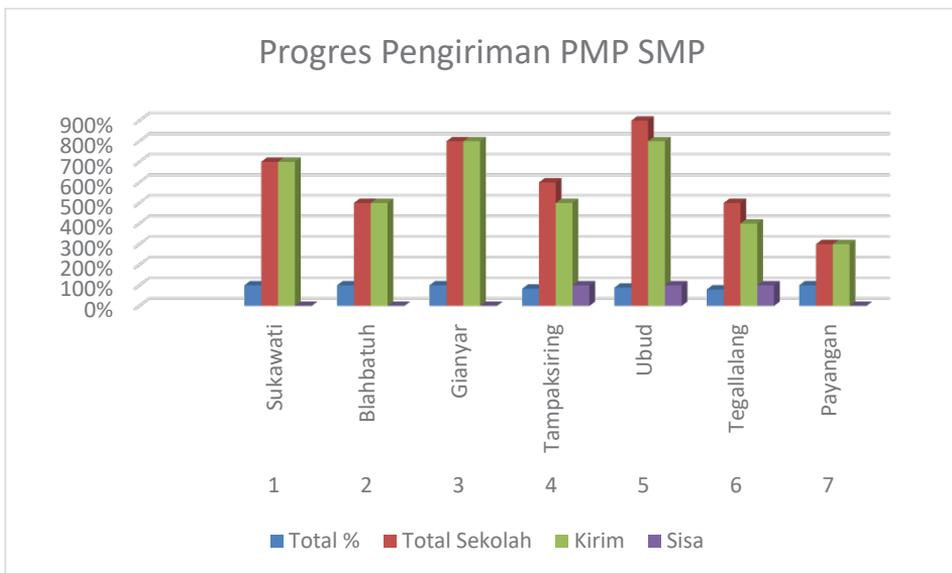
Untuk mengetahui jumlah sekolah yang sudah mengirimkan data PMP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018

No.	Kecamatan	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Sukawati	100%	7	7	0
2	Blahbatuh	100%	5	5	0
3	Gianyar	100%	8	8	0
4	Tampaksiring	83%	6	5	1
5	Ubud	88,89%	9	8	1
6	Tegallalang	80%	5	4	1
7	Payangan	100%	3	3	0
JUMLAH			43	40	3

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh tanggal 06-06-2019; 15:35)

Data Pengiriman PMP dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut.



Gambar 3.2 Grafik Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SMP di Kabupaten Gianyar yang seharusnya mengirimkan data PMP sebanyak 43 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman PMP tersebut hanya ada 40 sekolah yang sudah mengirimkan datanya, dan masih ada 3 sekolah yang belum mengirimkan data. Sekolah yang belum mengirim data PMP berasal dari Kecamatan Tampaksiring satu sekolah yaitu SMP Negeri Satu Atap Tampaksiring, Kecamatan Ubud satu sekolah yaitu SMP Udiyana Ukir dan satu sekolah dari Kecamatan Tegallalang yaitu SMP Kerta Wisata Taro. Pengiriman data tidak dilakukan oleh ketiga sekolah disebabkan karena SMP Udiyana Ukir tidak memiliki murid, SMP Kerta Wisata Taro karena tidak ada sumber daya untuk

menginput data dalam hal ini operator, sedangkan SMP Negeri Satu Atap Tampaksiring dikarenakan pimpinan masih berstatus plt yang tidak memenuhi ketentuan.

Dilihat dari kedua tabel dan grafik yang telah dipaparkan terdapat perbedaan data pada Dapodik dan PMP. Dengan diketahuinya perbedaan data ini, maka dalam analisis capaian rapor mutu daerahnya tidak akan menimbulkan pertanyaan.

3. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Gianyar

Perbedaan utama tampilan rapor mutu Tahun 2018 adalah adanya jumlah sekolah serta data sekolah yang telah mencapai level tertentu pada setiap standar. Pada tingkat kabupaten bahkan ketika angka yang menunjukkan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu di-klik akan muncul nama-nama sekolah tersebut. Dengan demikian daerah akan mudah melakukan intervensi terhadap sekolah tersebut pada masing-masing standar. Adapun respondennya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018

No.	Responden	Jumlah
1.	Jumlah Sekolah	40
2.	Pengawas	38
3.	Guru	536
4.	Siswa	3.550
5.	Komite	97
Total		4.261

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Tabel 3.4 Capaian SNP pada Level tertentu pada Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018

NO	STANDAR/ INDIKATOR/SUB INDIKATOR	NILAI	DISTRIBUSI 2018						
			Kategori	Kinerja	M1	M2	M3	M4	SNP
1	Standar Kompetensi Lulusan	6,58	★★★★		0	0	0	22	18
2	Standar Isi	6,08	★★★★		0	0	3	29	8
3	Standar Proses	6,65	★★★★		0	0	0	16	24
4	Standar Penilaian Pendidikan	6,33	★★★★		0	0	1	27	12
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,91	★★★		0	9	31	0	0
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,90	★★★		0	10	30	0	0

7	Standar Pengelolaan Pendidikan	6,11	★★★★★		0	1	0	39	0
8	Standar Pembiayaan	6,00	★★★★★		0	0	2	38	0

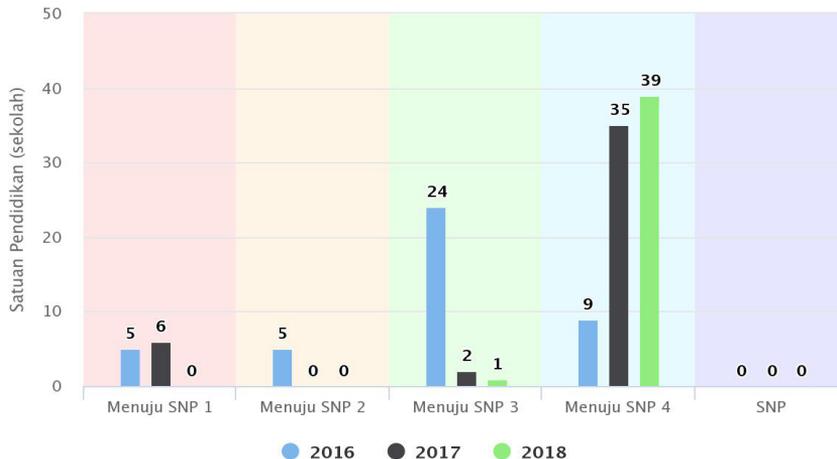
Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa kolom nilai adalah besarnya capaian nilai standar yang diperoleh yang didapat dari rata-rata nilai indikatornya. Sedangkan rata-rata nilai indikatornya didapat dari rata-rata sub indikatornya. Kolom katagori adalah level capaian masing-masing sekolah pada standar mulai bintang 1 sampai bintang 5, sesuai kriteria nilai yang sudah dibuatkan intervalnya. Kolom kinerja adalah capaian peningkatan atau penurunan hasil SNP dari tahun sebelumnya.

Dari tampilan garis pendek tersebut yang terlihat menurun adalah pada standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan standar Sarana dan Prasarana. Kolom sasaran menunjukkan banyaknya sekolah yang berada pada level tertentu. Misalnya pada Standar Kompetensi Lulusan ada sebanyak 18 sekolah yang sudah mencapai SNP, 22 sekolah yang berada pada level menuju SNP 4. Selanjutnya dari Tabel 3.4 didapat bahwa pada 4 standar yaitu Kompetensi Lulusan, Isi, Proses, dan Penilaian Pendidikan sudah ada sekolah yang sudah mencapai SNP. Tetapi untuk 4 standar yaitu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan belum ada yang mencapai SNP, bahkan untuk 2 standar yaitu PTK dan sarana prasarana belum ada sekolah yang berada pada level menuju SNP 4. Berdasarkan data responden yang mengisi data PMP, dapat diketahui ada tiga sekolah yang belum muncul rapor mutunya, karena dari 43 sekolah yang mengirim data PMP hanya 40 sekolah. Berikut capaian dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai 2018 adalah berikut.

Gambar 3.3 Capaian Rapor Mutu Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018

Capaian Per Kategori



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan data pada Gambar 3.3 dapat dijelaskan bahwa banyaknya sekolah yang berada pada level menuju SNP 1 semakin berkurang. Pada Tahun 2016 ada 5 sekolah, pada Tahun 2017 ada 6 sekolah dan pada Tahun 2018 sudah tidak ada sekolah yang berada pada level ini. Ini menunjukkan bahwa sekolah semakin mampu dalam meningkatkan level standarnya. Begitu pula pada level menuju SNP 2 dan menuju SNP 3 semuanya mengalami penurunan jumlah. Sedangkan pada level menuju SNP 4, sudah pasti mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 ada 9 sekolah, pada Tahun 2017 meningkat menjadi 35 sekolah sedangkan pada Tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 39 sekolah.

Besarnya capaian SNP untuk masing-masing standar dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

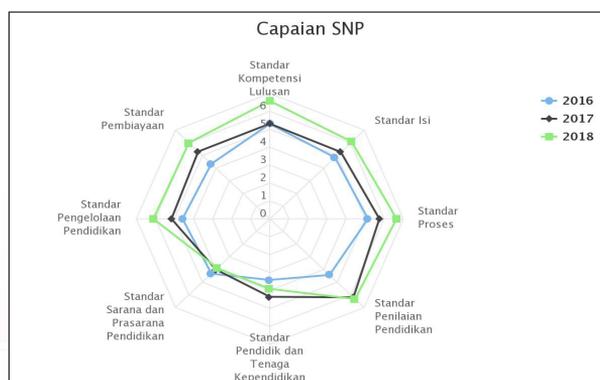
Tabel 3.5 Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Selama 3 Tahun

NO	SNP	2016	2017	2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	5.3	5.31	6.58
2	Standar Isi	4.84	5.27	6.08
3	Standar Proses	5.15	5.75	6.65
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.43	6.2	6.33
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.41	4.35	3.91
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.33	4.00	3.90
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.58	5.16	6.11
8	Standar Pembiayaan	4.34	5.31	6,00

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa capaian tiap standar hampir semuanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya saja untuk standar pendidikan dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana yang mengalami sedikit penurunan. Untuk lebih mudah melihatnya dapat dilihat pada grafik jaring laba-laba berikut.

Gambar 3.4 Grafik Radar Capaian mutu SNP Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Grafik radar menunjukkan bahwa pada standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan standar Sarana-Prasarana terjadi persilangan garis sedangkan pada standar yang lain tidak terjadi perpotongan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai mutu pada kedua standar tersebut. Untuk melihat penurunan dan penyebabnya akan dibahas dalam analisis setiap standar di bagian berikutnya.

B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan

Setelah melihat gambaran umum capaian SNP pada semua standar Tahun 2018, berikutnya akan dianalisis masing-masing standar untuk mencari solusi pemecahan masalah dan memunculkan rekomendasi yang dijadikan program perencanaan pemenuhan mutu pada tahun berikutnya. Hasil pada capaian Standar Kelulusan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6 Capaian Standar Kelulusan Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018	
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	6,58	★★★★
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6,95	★★★★★
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	6,95	★★★★★
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter	6,97	★★★★★
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6,96	★★★★★
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6,96	★★★★★
1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6,93	★★★★★
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6,97	★★★★★
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	6,91	★★★★★
1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6,95	★★★★★
1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	6,89	★★★★★
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6,99	★★★★★
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	5,51	★★★★
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	5,51	★★★★
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6,74	★★★★★
1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	6,59	★★★★
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	6,25	★★★★
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	6,8	★★★★★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018	
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6,96	★★★★★
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6,99	★★★★★
1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	6,84	★★★★★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Besarnya capaian Standar Kelulusan pada rapor mutu SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-ratanya sebesar 6,58. Dari ketiga indikator SKL yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan, nilai yang paling rendah adalah 5,51 pada pengetahuan. Indikator pengetahuan ini hanya memiliki satu sub indikator yaitu indikator 1.2.1 Memiliki pengetahuan faktual, prosuderal, konseptual, metakognitif. Dengan demikian penyebab rendahnya hanyalah dari sub indikator 1.2.1. Untuk mengetahui dari mana asal data tersebut, perlu ditelusuri asal data dengan membuka tabel konversi excel.

Pada tabel konversi excel ditemukan bahwa data 1.2.1 berasal dari data Dapodik dan PMP. Data yang diinput melalui aplikasi dapodik adalah data:

1. Rata-rata nilai rapor siswa kelas 7, 8 dan 9 untuk setiap mata pelajaran
2. Rata-rata hasil UN untuk 4 mapel yang diujikan
3. Tingkat kelulusan siswa kelas 9.

Data pada indikator 1.2.1 yang diperoleh dari pengisian instrumen PMP dapat dilihat pada perangkat instrumen PMP untuk jenjang SMP. Setelah dilakukan analisis atas pertanyaan dan kode sub indikator didapat bahwa pertanyaan untuk 1.2.1 adalah pertanyaan A7 (pada komponen A yaitu komponen hasil belajar dan nomor butir ke-7). Pertanyaan ini terdapat pada responden kepala sekolah dan pengawas. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

7. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas pengetahuan yang dimiliki

No	Tingkat	Frekuensi			
1	Tingkat Kabupaten	1	2	3	4
2	Tingkat Propinsi	1	2	3	4
3	Tingkat Nasional	1	2	3	4
4	Tingkat Internasional	1	2	3	4

Sumber: *Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 7)*

Dari 1 nomor pertanyaan akan dijawab 4 butir pertanyaan yang menanyakan prestasi siswa/kelompok atas pengetahuan yang dimiliki oleh sekolah. Sesuai kriteria jika mereka tidak mendapat penghargaan maka mereka pilih angka 1 baik pada tingkat kabupaten/provinsi/nasional/internasional, jika mendapat 1 sampai dengan 5 penghargaan mereka bisa pilih angka dan seterusnya. Sekolah hendaknya mengisi dengan memperhatikan bukti fisik yang ada. Adapun deskripsi dan bukti fisik yang harus diperhatikan pada sub indikator 1.2.1 ini dapat dilihat pada panduan teknis pengisian instrumen (halaman 99) sebagai berikut.

7. Sekolah menunjukkan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh kelompok/ individu siswa untuk mengukur tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah selama satu tahun terakhir.

Diisi mengacu pada:

- a) Piagam penghargaan dalam bentuk piala, plakat atau sertifikat yang dimiliki sekolah pada tahun berjalan.
- b) Diskusi dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 104)

Sekolah hendaknya mengisi butir pertanyaan ini dengan jujur untuk memudahkan mereka menentukan target keberhasilan pada program peningkatan berikutnya. Karena dari capaian pengetahuan yang diperoleh tahun ini akan digunakan untuk meningkatkan prestasi pada tahun-tahun berikutnya. Jika prestasi pengetahuan yang diinput sekarang tidak benar maka perencanaan yang dibuat juga tidak akan sesuai. Setelah mencermati paket instrumen sesuai jenjang, langkah selanjutnya adalah mencermati buku indikator. Pada kode 1.2.1 akan dapat dilihat deskripsi sub indikator untuk siswa jenjang SMP serta penyebab tidak tercapainya standar mutu. Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu adalah sebagai berikut.

1. Guru belum memiliki kompetensi yang sesuai standar dan tidak tersertifikasi sebagai pendidik.
2. Gaya dan metode pembelajaran yang diterapkan tidak mengarah pada bakat, minat dan kemampuan belajar siswa

Dengan memperhatikan buku indikator mutu yaitu pada penyebab tidak tercapainya standar mutu dapat diketahui masalah dan akar masalah, sehingga akan mudah membuat rekomendasi dan program pada perencanaan mutu. Adapun pilihan rekomendasi yang dapat diajukan daerah adalah sebagai berikut.

1. Perlu membuat program penyesuaian kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Perlu diberikan pelatihan peningkatan kompetensi pada mata pelajaran yang diampu.
3. Perlu menerapkan pengaturan beban belajar antara tatap muka dan penugasan di sekolah, sehingga tidak memberatkan siswa.
4. Perlu diberikan pelatihan terkait dengan gaya dan metode pembelajaran yang mengarah pada pengembangan bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
5. Perlu melengkapi sarana-prasarana pembelajaran yang lebih memadai.

C. Analisis Capaian Standar Isi

Analisis berikutnya adalah capaian pada standar isi. Seperti pada analisis SKL langkah yang dilakukan adalah mencermati rapor mutu pada standar isi, terutama capaian yang paling rendah karena akan menjadi prioritas penanganan. Setelah itu menelusuri asal data dengan membuka file tabel konversi, selanjutnya membuka paket instrumen dan

pedoman teknisnya serta mencermati buku indikator mutu untuk membuat rekomendasi. Adapun capaian rapor mutu pada standar isi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7 Capaian Standar Isi Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018	
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
2	Standar Isi	6,08	★★★★
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5,71	★★★★
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	5,66	★★★★
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	6,09	★★★★
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	5,92	★★★★
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	5,44	★★★«
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	5,43	★★★★
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	6,16	★★★★
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	5,67	★★★★
2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	6,99	★★★★★
2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan	5,4	★★★«
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan	6,56	★★★«
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	6,38	★★★★
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	6,99	★★★★★
2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	6,11	★★★★
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	5,68	★★★★
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa	6,72	★★★★★

Dari 3 indikator pada standar isi, capaian yang paling rendah adalah indikator 2.1. Adapun penyebab rendahnya nilai indikator itu adalah capaian terendah dari sub indikatornya yaitu pada sub indikator 2.1.5 yaitu “Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran. Setelah ditelusuri datanya pada tabel konversi didapat bahwa terdapat 8 butir pertanyaan pada sub indikator 2.1.5 yaitu pada pertanyaan B. Isi pendidikan

pada butir nomor 7, yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun butir pertanyaannya sebagai berikut.

7. Kesesuaian tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi dalam mata pelajaran di sekolah anda
Petunjuk arti angka adalah 1 tidak ada; 2 < 50%; 3 antara 51-85%; 4 > 85%

No	Mata Pelajaran	Tingkat kompetensi				Ruang Lingkup Materi			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1	2	3	4	1	2	3	4
3	Bahasa Indonesia	1	2	3	4	1	2	3	4
4	Matematika	1	2	3	4	1	2	3	4
5	Ilmu Pengetahuan Alam	1	2	3	4	1	2	3	4
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	1	2	3	4	1	2	3	4
7	Bahasa Inggris	1	2	3	4	1	2	3	4
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	1	2	3	4	1	2	3	4

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 12)

Berdasarkan kutipan dari instrumen dapat dijelaskan bahwa kesesuaian ruang lingkup materi untuk 8 mata pelajaran yang dipilih akan menentukan capaian hasil SNP nya. Untuk bisa menentukan apakah guru memperoleh skor 1, 2, 3 atau 4 maka bukti fisik mengacu pada kolom berikut.

7. Perangkat pembelajaran dikembangkan untuk semua mata pelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi pembelajaran. Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- Perangkat pembelajaran semua mata pelajaran.
- Buku yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran.
- Silabus dan RPP Guru mata pelajaran pada semua tingkat dan kelas.
- Telaah kesesuaian perangkat pembelajaran dengan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Hal terpenting yang harus dilihat saat pengisian adalah bahwa guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu. Bukti fisiknya adalah bahwa silabus dan RPP guru mata pelajaran pada semua tingkat dan kelas. Jika guru memberi skor 4 berarti riilnya guru telah memiliki silabus dan RPP yang lengkap paling tidak di atas 85% dari semua RPP yang mereka harus buat. Misalnya ada 20 RPP untuk matematika, maka guru matematika tersebut minimal telah membuat 18 RPP yang sudah sesuai ruang lingkup materinya. Jika dari 18 RPP yang dibuat hanya 10 yang baru sesuai ruang lingkup materinya, maka guru tersebut harus memberi skor 3. Terlebih lagi jika guru tidak membuat RPP atau hanya membuat RPP hanya 2 buah, maka guru tersebut harus memberi skor pada butir tersebut 2. Langkah selanjutnya adalah mencermati indikator mutu pada butir 2.1.5. Deskripsi dari sub indikator 2.1.5 adalah sebagai berikut.

- Menyesuaikan dengan perkembangan siswa pada jenjang SMP/MTs yaitu

- pada konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional
2. Menyesuaikan dengan yang dipelajari pada jenjang pendidikan dan sumber lain secara mandiri.
 3. Menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan.

Sumber: Indikator Mutu (2017: 20)

Resiko jika standar mutu tersebut tidak dicapai adalah sebagai berikut.

1. Materi pembelajaran sulit dicerna oleh siswa.
2. Lingkup pembelajaran yang diterima siswa tidak berkembang antar jenjang pendidikan.

Ketidaktercapaian standar mutu tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Kompetensi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran kurang.
2. Sekolah belum memperhatikan perkembangan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan, fungsi sekolah dan lingkungan siswa.

Dari resiko dan penyebab tersebut dapat dibuat rekomendasi pemenuhan mutu sebagai prioritas adalah sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran (misalnya pelatihan, pendampingan, supervisi, studi banding, belajar mandiri, lesan study, dan sebagainya).
2. Perlu membuat program pembelajaran dengan memperhatikan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan serta fungsi dan lingkungan siswa.

D. Analisis Capaian Standar Proses

Berikut adalah capaian setiap sub indikator pada standar proses pada rapor mutu SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018.

Tabel 3.8 Capaian Standar Proses Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018	
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
3	Standar Proses	6,65	★★★★
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6,77	★★★★★
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	6,85	★★★★★
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6,97	★★★★★
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	6,71	★★★★★
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6,55	★★★★
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6,76	★★★★★
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	6,59	★★★★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018	
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6,85	★★★★★
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	6,83	★★★★★
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	6,82	★★★★★
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6,9	★★★★★
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6,89	★★★★★
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	6,8	★★★★★
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	6,79	★★★★★
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6,95	★★★★«
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	6,9	★★★★«
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.	6,88	★★★★«
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa	6,42	★★★★
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	6,19	★★★★«
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	6,67	★★★★«
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	6,92	★★★★★
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6,41	★★★★
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif	5,95	★★★★
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik	6,65	★★★★«
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	6,6	★★★★«
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	6,08	★★★★
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	6,45	★★★★«
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	6,74	★★★★«

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 3 indikator yang terdapat dalam standar proses, capaian pada indikator 3.3 yang paling rendah. Dari 6 sub indikatornya capaian yang paling rendah yaitu sub indikator 3.3.1. Data sub indikator 3.3.1 didapat dari 3 butir pertanyaan pada instrumen komponen C (proses pendidikan) nomor butir 14 yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Butir pertanyaan adalah sebagai berikut.

14. Aspek dan perangkat penilaian otentik yang digunakan guru di sekolah anda

No	Aspek	Angket	Observasi	Catatan Anekdote	Refleksi
1	Kesiapan siswa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Proses belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Hasil belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 18)

Pertanyaan ini bertujuan untuk menanyakan apakah guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian terhadap siswa baik pada kesiapan belajarnya (sebelum pembelajaran), proses belajar (selama pembelajaran) dan hasil belajar (setelah pembelajaran). Jika guru melakukan ketiga hal tersebut, berarti guru sudah melaksanakan penilaian secara otentik. Guru dapat memilih jenis penilaian yang digunakan. Untuk melihat bukti fisik yang diacu, dapat melihat pedoman teknis pengisian instrumen sesuai nomor butir pertanyaannya, seperti berikut ini.

14. Penilaian otentik menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian otentik secara komprehensif, baik di kelas, bengkel kerja, laboratorium, maupun tempat praktik kerja, dengan menggunakan: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen instrumen penilaian otentik,
- b) Observasi pelaksanaan penilaian otentik,
- c) Hasil penilaian otentik;
- d) Diskusi dengan guru

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 115)

Penilaian otentik ini muncul pada standar proses. Hal ini bisa dijelaskan bahwa sesuai pedoman teknis di atas bahwa keterpaduan kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh akan menggambarkan kapasitas, gaya dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan sikap. Jadi dengan melakukan penilaian otentik secara komprehensif akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah/pengawas/guru dapat menentukan jawaban dari bukti fisik yang mereka miliki seperti dokumen instrumen penilaian otentik, observasi pelaksanaan otentik, hasil penilaian dan diskusi dengan guru. Ketidaktercapaian standar mutu pada sub indikator 3.3.1. akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut.

1. Guru kesulitan dalam memperbaiki proses pembelajaran.

2. Siswa tidak memiliki dorongan untuk mencapai aspek pengetahuan dan keterampilan.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena guru belum memahami prosedur penilaian otentik dengan baik serta guru belum mampu mengidentifikasi instrumen yang dapat digunakan sebagai penilaian otentik. Dengan mencermati resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu pada 3.3.1 maka dapat dibuatkan rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam memahami penilaian otentik dengan baik.
2. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengidentifikasi instrumen penilaian sehingga dapat memilih dan mengembangkan instrumen penilaian otentik.

E. Analisis Capaian Standar Penilaian

Tabel 3.9 Capaian Standar Penilaian Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018	
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
4	Standar Penilaian Pendidikan	6,33	★★★★
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6,61	★★★★
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	6,71	★★★★★
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	6,51	★★★★
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	6,35	★★★★
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	6,51	★★★★
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	6,2	★★★★
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6,71	★★★★★
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	6,73	★★★★★
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	6,69	★★★★★
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	6,28	★★★★
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	6,33	★★★★
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	6,37	★★★★
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	6,15	★★★★
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5,72	★★★★
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	6,74	★★★★★
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	6,51	★★★★
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai	3,9	★★★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 5 indikator pada standar penilaian ini yang memiliki nilai terendah adalah pada indikator ke-5 dan nilai terendah sub indikatornya adalah 4.5.3. Hasil penelusuran data pada sub indikator 4.5.3 diperoleh informasi bahwa terdapat 40 butir pertanyaan dari perangkat instrumen PMP yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

12. Pertimbangan cara hitung penilaian pendidikan di sekolah anda.

No	Mata Pelajaran	Penilaian Hasil Belajar					Kelulusan				
		Ulangan	Pengamatan	Penugasan	Penilaian Lain	Total	Ujian Sekolah	Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan	Total
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
3	Bahasa Indonesia	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
4	Matematika	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
5	Ilmu Pengetahuan Alam	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
7	Bahasa Inggris	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
8	Seni Budaya	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
9	Prakarya	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
10	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 23)

Pertanyaan untuk sub indikator 4.5.3 adalah terletak pada pernyataan yang diberi kotak yaitu pada komponen kelulusan. Pada komponen tersebut ada 4 kolom yang isinya masing-masing adalah ujian sekolah, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sedangkan jumlah mata pelajaran ada 10, sehingga banyaknya isian sebanyak 4 x 10 yaitu 40 butir pertanyaan. Persentase yang diisi pada kolom komponen tersebut harus berjumlah 100% sesuai nilai yang sudah ditulis pada total. Guru hanya mengisi sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Untuk menentukan cara menjawab dari responden dapat dilihat pada pedoman teknis instrumen sebagai berikut.

12. Guru mempertimbangkan penilaian hasil belajar siswa dalam bentuk:

- Ulangan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Siswa.
- Pengamatan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator hasil belajar yang diamati.
- Penugasan dengan memberikan tugas yang dikerjakan siswa secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.
- Bentuk penilaian lain dapat berupa jurnal, portofolio, dan penilaian proyek.

Sekolah mempertimbangkan penentuan kelulusan siswa berdasarkan:

- Ujian sekolah.
- Penilaian sikap.
- Penilaian pengetahuan.
- Penilaian keterampilan.

Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, pengamatan, penugasan dan bentuk lain.
- b) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, UAS, UUK, UKK.
- c) Diskusi dengan guru dan siswa.
- d) Pedoman ketentuan kelulusan.
- e) Notulen rapat penentuan kelulusan.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 119)

Setelah memahami dari mana asal data tersebut, langkah selanjutnya mencermati indikator mutu untuk melihat resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut, agar nanti dapat dibuatkan rekomendasinya. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut.

1. Kenaikan kelas dan kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.
2. Pertimbangan penentuan kelulusan siswa:
 - a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - b) Ujian sekolah.
 - c) Ujian sekolah berstandar nasional.
 - d) Penilaian sikap.
 - e) Penilaian pengetahuan.
 - f) Penilaian keterampilan.

Resiko jika standar mutu tersebut tidak tercapai adalah:

1. Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak dapat diketahui dengan tepat.
2. Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian.

Dengan mencermati penyebab tidak tercapainya standar mutu pada sub indikator 4.5.3, maka rekomendasi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan sosialisasi terkait peraturan yang terbaru secara rutin dengan program sistematis dan terencana.
2. Perlu mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian termasuk penentuan kelulusan siswa.

F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.10 Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018	
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,91	★★★
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3,82	★★★
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6,06	★★★★
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran	0	★
5.1.4.	Bersertifikat pendidik	5,84	★★★★
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik	4,75	★★★
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	5,21	★★★★
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik	0	★
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5,91	★★★★
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6,65	★★★★
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	6,3	★★★★
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan	6,82	★★★★★
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	5,25	★★★★
5.2.5.	Bersertifikat pendidik	5,77	★★★★
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah	5,25	★★★★
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	2,92	★★
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	3,23	★★
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	3,04	★★
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	2,4	★★
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	3,06	★★
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	2,03	★★
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	0,52	★
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat	0,17	★
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat		★
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	6,47	★★★★
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	4,13	★★★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018	
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik		★
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik		★
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0,88	★
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium	0	★
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai	4,9	★★★
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat		★
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	2,62	★★
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0,17	★
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan		★
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0,17	★
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan		★
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik		★
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik		★
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	2,02	★★
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan	5,6	★★★★
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai	4,72	★★★
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat		★
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai	2,8	★★
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0	★
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan	0,35	★
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik		★
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik		★
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik		★
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik		★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini memiliki 5 indikator yaitu ketersediaan dan kompetensi dari guru, kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, laboran dan pustakawan. Pada perangkat instrumen tidak ada butir pertanyaan pada standar PTK ini, karena capaian nilainya berasal dari input data dapodik. Selain itu kompetensi guru dan kepala sekolah berasal dari nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) Tahun 2015. Berdasarkan capaian hasil dalam Tabel 3.10 dapat dijelaskan hampir semua nilai tenaga kependidikannya (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) rendah, terutama pada ketersediaannya. Karena tidak tersedia maka sudah pasti untuk kompetensi masing-masing akan kosong. Tetapi walaupun tenaga kependidikan (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) di sekolahnya ada, kompetensi ini juga masih tidak ada nilainya (na/0) karena memang datanya belum tersedia.

Pada ketersediaan dan kompetensi guru akan dibahas masing-masing sub indikator. Pada sub 5.1.5 yaitu guru berkompotensi pedagogik minimal baik nilainya 4,75. Jika nilai ini dikonversi ke skala 100, besarnya adalah $4,75/7 \times 100 = 67,86$. Ini berarti masih ada 32,14 % guru yang belum berkompotensi pedagogik minimal baik.

Dengan mencermati indikator mutu, capaian sub indikator 5.1.5 yang belum mencapai standar akan berdampak pada kedalaman substansi materi pembelajaran yang diberikan guru kurang maksimal. Beberapa penyebab indikator ini belum tercapai adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya pemahaman tentang kompetensi pedagogik
2. Paradigma guru dalam pengembangan belum berkembang
3. Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Dengan demikian beberapa rekomendasi yang dapat dibuat daerah adalah:

1. Perlu terus mensosialisasikan dan memotivasi guru untuk meningkatkan kualifikasinya.
2. Perlu memberikan ketegasan kepada penyelenggara pendidikan agar merekrut guru sesuai ketentuan.

Pada indikator 5.2 yaitu ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan kepala sekolah terdapat 11 sub indikator. Sub indikator sepuluh yaitu dengan kode 5.2.10 adalah kepala sekolah berkompotensi supervisi minimal baik. Pada sub 5.2.10 memiliki nilainya 2,40. Jika nilai ini dikonversi ke skala 100, besarnya adalah $2,40/7 \times 100 = 34,29$. Ini berarti masih ada 65,71 % kepala sekolah yang belum berkompotensi supervisi minimal baik.

Dengan mencermati indikator mutu, capaian sub indikator 5.2.10 yang belum mencapai standar akan berdampak pada efektifitas pengelolaan pendidikan. Beberapa penyebab indikator ini belum tercapai adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya pemahaman tentang kompetensi supervisi
2. Paradigma Kepala Sekolah terhadap kompetensi supervisi belum terbentuk
3. Tugas Kepala sekolah sangat banyak, sehingga supervisi akademik maupun manajerial yang harusnya dilakukan oleh kepala sekolah sering tidak terlaksana, sehingga kerap kali diserahkan kepada wakil kepala sekolah

Dengan demikian beberapa rekomendasi yang dapat dibuat daerah adalah:

1. Perlu peningkatan kompetensi kepala sekolah tentang supervisi
2. Perlu manajemen pelaksanaan supervisi akademik

Pada sub indikator 5.4.7 yaitu tersedia tenaga laboran capaiannya sebesar 0,17 (2,43%), dapat dijelaskan bahwa hanya 2,43% SMP di Kabupaten Gianyar yang mempunyai tenaga laboran. Untuk kompetensi kepala laboran, teknisi laboran dan tenaga laboran ini juga tidak tersedia.

Dengan mencermati indikator mutu, capaian sub indikator 5.4.7 yang belum mencapai standar akan berdampak pada kegiatan pratikum banyak tidak tercatat dan bahan pratikum juga tidak diinventarisir. Beberapa penyebab indikator ini belum tercapai adalah dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan tenaga teknisi laboratorium. Dengan demikian beberapa rekomendasi yang dapat dibuat daerah yaitu perlu adanya alokasi dana untuk menyediakan tenaga teknisi laboratorium.

Indikator terakhir yaitu ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan. Di dalam Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 disebutkan bahwa setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah. Capaian hasil pada sub indikator 5.5.5 yaitu tersedia tenaga Pustakawan adalah sebesar 0 (0%). Ini berarti SMP di Kabupaten Gianyar belum memiliki tenaga Pustakawan.

Begitu pentingnya tenaga pustakawan di sekolah, jika ini tidak tercapai akan berdampak pada hal-hal berikut.

1. Kebijakan program perpustakaan tidak terlaksana
2. Koleksi perpustakaan kurang terawat
3. Anggaran dan keuangan perpustakaan tidak terkelola dengan baik

Pada umumnya hal ini disebabkan oleh:

1. Penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan.
2. Dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan tenaga pustakawan.

Dari beberapa penyebab tersebut dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu menganggarkan pengadaan tenaga pustakawan di sekolah dalam pengadaan pustakawan.
2. Perlu memberikan sosialisasi kepada penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia agar menyediakan tenaga pustakawan.
3. Perlu peningkatan kompetensi tenaga pustakawan.

G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana

Analisis pada standar sarana prasarana ini sebenarnya sangat banyak, karena nilai rata-rata capaian standarnya sangat rendah yaitu 3,90, sebagai akibat nilai indikator dan sub indikatornya banyak yang rendah. Tetapi pada standar sarpras ini yang akan dianalisis adalah sub indikator 6.2.10 yaitu kondisi ruang kelas layak pakai.

Tabel 3.11 Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018	
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,9	★★★
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4,2	★★★
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai		★
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	5,33	★★★★
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan	6,93	★★★★★
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa	2,75	★★
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan	6,37	★★★★
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	1,98	★
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	3,01	★★
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	5,35	★★★★
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	1,99	★
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	2,82	★★
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	0,01	★
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	5,38	★★★★
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai	1,87	★
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	0	★
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai	6,93	★★★★★
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2,46	★★
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	1,77	★
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	0,31	★
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	1,18	★
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar	0,35	★
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	4,13	★★★
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar	0,61	★
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar		★
6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar	0,5	★
6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar	0,1	★
6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar	0	★
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak	6,84	★★★★★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018	
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai	6,21	★★★★
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai	2,8	★★
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai	1,99	★
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai	3,4	★★
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai	0,96	★
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar	4,23	★★★
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai		★
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai	6,8	★★★★★
6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai	2,48	★★
6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai	0,11	★
6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai	1,04	★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Diambilnya sub indikator 6.3.9 yaitu memiliki ruang konseling karena sub indikator ini merupakan salah satu indikator pendidikan dalam profil pendidikan daerah yang dikembangkan dari misi Kemdikbud yaitu mewujudkan layanan pembelajaran yang bermutu untuk mendukung implementasi pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti. Setelah dicek pada tabel konversi excel didapat bahwa data ini berasal dapodik yaitu pertanyaan yang menyebutkan prasarana dan sarana ruang konseling. Adapun deskripsi dari sub indikator ini adalah sebagai berikut. Besarnya capaian pada rapor mutu adalah 0,1 (1,4%), ini berarti sebanyak 98,6% SMP di Kabupaten Gianyar belum memiliki ruang konseling sesuai standar. Ruang konseling sesuai standar ini merupakan salah satu indikator yang penting dan menjadi prioritas baik pada satuan pendidikan maupun daerah, karena layanan pembelajaran tidak akan maksimal. Rekomendasinya adalah: mengadakan Ruang konseling sesuai standar

H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan memiliki 4 indikator, di antara 4 indikator ini, capaian nilai yang terendah adalah pada indikator ke-3. Rendahnya nilai kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan ini disebabkan oleh sub indikator yang terendah yaitu pada sub indikator 7.3.6 yaitu melakukan supervise dengan baik.

Tabel 3.12 Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Gianyar Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018	
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	6,11	★★★★
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6,62	★★★★
7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	6,79	★★★★★
7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	6,69	★★★★★
7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	6,39	★★★★
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6,54	★★★★
7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	6,28	★★★★
7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	6,77	★★★★★
7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	6,46	★★★★
7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	6,61	★★★★
7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	6,47	★★★★
7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	6,63	★★★★
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2,16	★★
7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik		★
7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan	6,22	★★★★
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	0	★
7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik	6,78	★★★★★
7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	0	★
7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	0	★
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6,5	★★★★
7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	6,5	★★★★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Setelah dicek pada tabel konversi excel didapat bahwa data ini berasal dari dapodik yaitu pertanyaan yang menyebutkan rata-rata skor kompetensi supervisi Kepala Sekolah. Besarnya capaian pada rapor mutu adalah 0 (0%), ini berarti Kepala SMP di Kabupaten Gianyar sebagian besar belum melaksanakan supervisi dengan baik. Rekomendasinya adalah: Perlu peningkatan kompetensi kepala sekolah tentang supervisi.

I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan

Butir pertanyaan untuk standar pembiayaan tidak ada secara khusus pada perangkat instrumen PMP. Tetapi ada 5 butir pertanyaan untuk pembiayaan yang dimasukkan ke dalam standar pengelolaan yaitu untuk sub indikator: 8.2.1; 8.3.2 dan 8.3.3.

Tabel 3.13 Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SMP
Kabupaten Gianyar Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018	
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
8	Standar Pembiayaan	6	★★★★
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6,76	★★★★★
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	6,65	★★★★
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	6,65	★★★★
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	7	★★★★★
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6,94	★★★★★
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6,94	★★★★★
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4,3	★★★
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya	0	★
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	6,4	★★★★
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	6,5	★★★★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan hasil pada Tabel 3.13 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 3 indikator pada standar pembiayaan yang paling rendah adalah indikator 8.3 terutama pada sub indikator 8.3.1. Karena 8.3.1 bersumber dari data dapodik, maka analisis berikutnya diteruskan pada sub indikator terendah berikutnya yaitu 8.3.2.

Pada sub indikator 8.3.1 capaiannya hanya 0, ini berarti semua SMP di Kabupaten Gianyar belum mendapatkan bantuan dana pemerintah pusat. Selanjutnya pada indikator 8.3.2 capaiannya 6,40, ini masih tergolong pada level menuju SNP 4, ini berarti ada beberapa SMP di Kabupaten Gianyar belum memiliki laporan pengelolaan dana yang lengkap.

Setelah dicek pada butir instrumen, pertanyaannya adalah sebagai berikut.

No	Pedoman Sekolah	Ketersediaan	Sosialisasi				
			Guru	Tendik	Siswa	Orang Tua	Komite
1	kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
2	kalender pendidikan/akademik;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
3	struktur organisasi sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
4	pembagian tugas di antara guru;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
5	pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
6	peraturan akademik;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
7	tata tertib sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
8	kode etik sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
9	biaya operasional sekolah/madrasah	<input checked="" type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
10	pedoman sekolah aman	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
11	pedoman sekolah sehat (UKS)	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				

Pada nomor 6 komponen pengelolaan yaitu butir nomor 9 ditanyakan apakah sekolah memiliki laporan biaya operasional. Untuk dapat memberikan jawaban yang benar dan sesuai maka acuannya adalah pedoman teknisnya sesuai butir tersebut yaitu sebagai berikut.

<p>6. Sekolah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Pedoman pengelolaan sekolah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); ▪ kalender pendidikan/akademik; ▪ struktur organisasi sekolah; ▪ pembagian tugas di antara guru; ▪ pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; ▪ peraturan akademik; ▪ tata tertib sekolah; ▪ kode etik sekolah; ▪ biaya operasional sekolah. <p>Pedoman disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah untuk menjamin tercapainya pengelolaan secara transparan dan akuntabel.</p> <p>Diisi mengacu pada:</p> <p>a) Pedoman pengelolaan yang ditetapkan sekolah.</p> <p>b) Diskusi dengan warga sekolah, komite sekolah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan.</p>
--

Belum tercapainya sub indikator tersebut secara optimal akan berdampak pada hal-hal berikut.

1. Rentan terhadap tuduhan tindak pidana KKN kepada bendahara dan kepala sekolah oleh pemangku kepentingan.
2. Proses pemantauan, supervisi, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan akan sulit dilakukan.

3. Sekolah terkendala dalam membangun kemitraan dengan lembaga lain.

Belum tercapainya sub indikator tersebut secara optimal kemungkinan disebabkan oleh kemampuan pendidik/tenaga kependidikan dalam penyusunan laporan pengelolaan pendanaan terbatas dan beban kinerja pendidik/tenaga kependidikan yang diberikan tugas sebagai bendahara terlalu banyak sehingga tidak memiliki waktu untuk menyusun laporan tersebut. Berdasarkan penyebab tersebut dapat diajukan rekomendasi adalah perlu mengembangkan sistem manajemen laporan pengelolaan dana dengan baik, transparan, dan akuntabel.

J. Identifikasi Masalah Penyusunan Peta Mutu

Data dapodik dan data PMP merupakan sumber data utama untuk penyusunan peta mutu pendidikan. Data dapodik di-*entry* oleh operator dapodik sesuai dengan kondisi riil data satuan pendidikan melalui mekanisme sinkronisasi data sehingga menjadi data yang *upto-date*. Data PMP dkumpulkan melalui perangkat instrument PMP diisi oleh responden, divalidasi oleh pengawas sekolah, di-*entry* oleh operator, di agregasi oleh system sehingga menghasilkan rapor mutu. Demikian panjangnya proses untuk mendapatkan data mutu, maka sangat mungkin terjadi kesalahan prosedur sehingga datanya menjadi bermasalah dan data mutunya juga bermasalah. Identifikasi masalah penyusunan peta mutu pendidikan disajikan pada tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14 Identifikasi masalah Penyusunan Peta Mutu.

KOMPONEN	PERMASALAHAN	SOLUSI
Sistem pemetaan	Pertanyaan dalam instrumen kurang reliable (persepsi)	1. Penyamaan pemahaman/persepsi terhadap setiap item perangkat PMP pada seluruh responden. 2. Memberikan rubrik setiap item perangkat PMP
	Error dalam proses dokumentasi dalam aplikasi	1. Lakukan <i>Back-up</i> data 2. Lakukan input data sesuai ketentuan
	Desain responden yang salah	1. Menunjuk responden sesuai tagihan perangkat PMP 2. Pastikan setiap responden melakukan pengisian data

KOMPONEN	PERMASALAHAN	SOLUSI
Petugas pemetaan	Kurang mendapat penjelasan mekanisme pengumpulan data	Pengawas sekolah memberikan penjelasan mekanisme pengumpulan data pada sekolah binaannya
	Tidak mendampingi proses pengisian	Pengawas sekolah wajib mendampingi operator dan responden untuk input data mutu
	Tidak melakukan validasi terhadap hasil pengumpulan data	Kepala sekolah dan Pengawas sekolah wajib melakukan validasi instrument data mutu sebelum di-entry
Responden	Diisi berdasarkan persepsi dan bukan observasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan responden mengisi data sesuai kondisi riil 2. Kepala sekolah dan pengawas sekolah melakukan verifikasi terhadap data isian perangkat PMP
	Pengisian dilakukan oleh orang lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan responden yang ditunjuk mengisi instrumen data mutu PMP 2. Memberikan waktu yang memadai terhadap responden untuk mengisi instrument data mutu
	Proses dokumentasi dari isian manual ke dalam aplikasi tidak akurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operator bekerja dengan cermat 2. Pengawas Pembina memvalidasi data sebelum di entry

K. Verifikasi dan Validasi Data Mutu

Data yang digunakan untuk menyusun peta mutu pendidikan pada intinya berasal dari 2 (dua) sumber utama yakni data yang berasal dari responden satuan pendidikan melalui perangkat PMP dan data Dapodik yang diinput oleh operator dapodik satuan pendidikan. Data PMP digunakan untuk memetakan mutu pendidikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian. Sedangkan data dapodik digunakan untuk memetakan mutu pendidikan untuk Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.

Proses pengumpulan data melibatkan banyak responden dan proses sehingga sangat memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian data antara kondisi riil pada satuan pendidikan dengan data yang diinput pada aplikasi dapodik maupun aplikasi PMP. Permasalahan ketidaksesuaian data dapat disebabkan oleh komponen sistem yang error,

komponen pengimput data, dan komponen responden seperti yang dijelaskan pada point J diatas. Terkait dengan ketidaksesuaian data masing-masing Standar Nasional Pendidikan pada jenjang SMP di Kabupaten Gianyar disajikan pada tabel 3.15 berikut.

Tabel 3.15 Data SNP yang tidak sesuai dengan kondisi riil satuan pendidikan

NO	STANDAR	DATA YANG BELUM SESUAI	SOLUSI
1	Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Pengetahuan. (Pada dasarnya seluruh siswa yang telah dinyatakan lulus pasti memenuhi syarat lulus yang didalamnya sudah mengandung kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan) 2. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual. (Seluruh siswa yang telah mengikuti pembelajaran dan telah tuntas dalam setiap KD memiliki kompetensi Faktual, konseptual dan prosedural, tetapi masih banyak belum memiliki kompetensi metakognitif. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang dilakukan pada satuan pendidikan belum semuanya berbasis pembelajaran HOTS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan semua dokumen pendukung terkait dengan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan sebelum mengisi perangkat PMP. 2. Dari segi kebutuhan data dapat dilakukan analisis leger nilai siswa terkait dengan persentase ketuntasan belajar. Terkait dengan meningkatkan kompetensi metakognitif siswa perlu dilakukan perbaikan pembelajaran di satuan pendidikan agar berbasis HOTS

NO	STANDAR	DATA YANG BELUM SESUAI	SOLUSI
2	Standar Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memuat karakteristik kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan pada perangkat pembelajaran. (Ketidaksesuaian data ini sangat dimungkinkan karena kesalahan persepsi responden terhadap substansi karakteristik kompetensi. Jika guru mata pelajaran menyusun perangkat pembelajaran sudah sesuai dengan KI dan KD yang tertera pada regulasi yang berlaku(Permendikbud nomor 22 tahun 2016) maka karakteristik kompetensi sudah sesuai) 2. Pengembangan kurikulum tidak sesuai prosedur.(Secara umum sekolah mengikuti prosedur pengembangan KTSP, tetapi tidak dilengkapi dengan bukti fisik yang memadai) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala sekolah melalui kegiatan supervisi dapat memastikan kesesuaian karakter kompetensi siswa dengan kompetensi pada Permendikbud yang sesuai. Untuk kepentingan data PMP responden dapat menggunakan perangkat pembelajaran guru dan hasil supervise kepala sekolah sebagai rujukan. 2. Bukti fisik prosedur pengembangan KTSP dijadikan lampiran pengembangan KTSP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
3	Standar Proses	Data kelemahan pada Standar Proses seperti minimnya penggunaan media dan supervise pembelajaran masih kurang	Kepala sekolah meningkatkan supervise pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi di bidang inovasi pembuatan dan penggunaan media pembelajaran.
4	Standar Penilaian	Belum semua sekolah dalam menentukan kelulusan siswa memperhatikan semua unsur, pengetahuan,sikap, keterampilan	Memberikan pemahaman kepada responden tentang standar operasional prosedur penentuan kelulusan siswa.
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Data yang tidak sesuai adalah data tentang kualifikasi guru dan kepala sekolah.	Perlu dilakukan sinkronisasi data dapodik dengan baik, ketidak sesuaian data kemungkinan disebabkan oleh system yang kurang mendukung. Error).

NO	STANDAR	DATA YANG BELUM SESUAI	SOLUSI
6	Standar Sarana dan Prasarana	Secara umum kondisi sarana dan prasaran pendukung pendidikan masih kurang sesuai standar sehingga data yang ada memang sesuai kenyataan, kecuali untuk beberapa sekolah.	Operator melakukan <i>update</i> data prasarana sekolah pada dapodik. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan.
7	Standar Pengelolaan	Data yang tidak sesuai dengan kondisi riil di sekolah adalah data tentang kinerja kepala sekolah. Sumber data kinerja kepala sekolah tidak ter-update setiap tahun baik melalui data PMP maupun dapodik. Penilaian kinerja kepala sekolah telah dilakukan setiap tahun.	Dibutuhkan aplikasi khusus atau sub aplikasi dalam dapodik untuk melakukan <i>update</i> kinerja kepala sekolah.
8	Standar Biaya	Data tentang pengelolaan dana sekolah kurang sesuai dengan kondisi riil, karena pengelolaan dana BOS di sekolah sebagai satu-satunya sumber dana telah diverifikasi oleh pihak inspektorat daerah dan secara sampling sudah di audit BPK.	Data pengelolaan keuangan sekolah belum dapat diambil dari data dapodik karena sampai saat ini belum ada fitur pengelolaan keuangan (BOS) pada dapodik. Hal ini perlu dipertimbangkan agar pengelolaan keuangan memiliki data yang ter- <i>update</i> .



PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan pada Bab II dan Bab III maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Data Peta Mutu Pendidikan Kabupaten Gianyar tahun 2018 diperoleh dari pendataan mutu pendidikan melalui perangkat Pendataan Mutu Pendidikan (PMP) dan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
2. Peta Mutu Pendidikan menyediakan informasi mutu pendidikan Kabupaten Gianyar dan dapat digunakan sebagai basis data untuk merancang program peningkatan mutu pendidikan seluruh *stakeholders* pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
3. Terjadi ketidaksesuaian data pada beberapa item Standar Nasional Pendidikan (SNP) disebabkan oleh komponen system pemetaan, petugas pemetaan dan responden.
4. Dalam Evaluasi Diri Sekolah (EDS) data yang tidak sesuai langsung disesuaikan dengan kondisi riil sekolah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis peta mutu pendidikan diatas, dapat direkomendasikan beberapa alternatif solusi peningkatan mutu pendidikan sesuai kondisi riil pada setiap Standar Nasional Pendidikan. Rekomendasi Peningkatan Mutu pendidikan dapat disajikan pada uraian berikut.

1. Peningkatan Mutu Standar Kompetensi Lulusan

- a. Perlu membuat program penyesuaian kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang diampu.

- b. Perlu diberikan pelatihan peningkatan kompetensi pada mata pelajaran yang diampu.
 - c. Perlu menerapkan pengaturan beban belajar antara tatap muka dan penugasan di sekolah, sehingga tidak memberatkan siswa.
 - d. Perlu diberikan pelatihan terkait dengan gaya dan metode pembelajaran yang mengarah pada pengembangan bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
 - e. Perlu melengkapi sarana-prasarana pembelajaran yang lebih memadai.
- 2. Peningkatan Mutu Standar Isi**
- a. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran (misalnya pelatihan, pendampingan, supervisi, studi banding, belajar mandiri, lesson study, dan sebagainya).
 - b. Perlu membuat program pembelajaran dengan memperhatikan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan serta fungsi dan lingkungan siswa.
- 3. Peningkatan Mutu Standar Proses**
- a. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam memahami penilaian otentik dengan baik.
 - b. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengidentifikasi instrumen penilaian sehingga dapat memilih dan mengembangkan instrumen penilaian otentik.
- 4. Peningkatan Mutu Standar Penilaian**
- a. Perlu mengadakan sosialisasi terkait peraturan yang terbaru secara rutin dengan program sistematis dan terencana.
 - b. Perlu mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian termasuk penentuan kelulusan siswa.
- 5. Peningkatan Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
- a. Perlu menganggarkan pengadaan tenaga pustakawan di sekolah.
 - b. Perlu memberikan sosialisasi kepada penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia agar menyediakan tenaga pustakawan.
 - c. Perlu peningkatan kompetensi tenaga pustakawan.
- 6. Peningkatan Mutu Standar Sarana dan Prasarana**
- a. Mengadakan Ruang konseling sesuai standar
- 7. Peningkatan Mutu Standar Pengelolaan**
- a. Perlu peningkatan kompetensi kepala sekolah tentang supervisi.
- 8. Peningkatan Mutu Standar Pembiayaan**
- a. Perlu mengembangkan sistem manajemen laporan pengelolaan dana dengan baik, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Denim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : Pustaka Setia
- Djaali. 2014. Psikologi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara
- Kemdikbud. 2017. Indikator Mutu dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
- Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah;
- Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, tentang Standar Sarana dan Parsarana;
- Permendiknas Nomor 19 tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan;
- Permendiknas Nomor 24 tahun 2008, tentang pengelolaan Tata usaha;
- Permendiknas Nomor 25 tahun 2008, tentang Perpustakaan;
- Permendiknas Nomor 26 tahun 2008, tentang pengelolaan Laboratorium;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Permendikbud Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan; Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi;
- Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses; Permendikbud Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
- Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.
- Permendikbud No 37 tahun 2018 tentang perubahan Permendikbud No 24 tahun 2016.
- Satori.2016. Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta: Alfabeta
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id> <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id>
- <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>
- <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/>
- <http://statistik.data.kemdikbud.go.id>
- <http://npd.kemdikbud.go.id/>

